



Lemhannas RI

Tanhanna Dharmma Mangrva

Edisi 73, Agustus 2015



Counselor Kedubes Sudan Jajaki Kerja Sama dengan Lemhannas RI **hal 2**



Presidential Lecture Presiden Republik Turki di Lemhannas RI **hal. 4**



Delegasi Perancis Hadiri Konferensi Internasional tentang Cyber Security **hal. 8**



Lemhannas RI Kaji Revitalisasi Pengelolaan Peternakan Sapi **hal. 11**



Melalui Refleksi Sidang BPUPKI-PPKI, Lemhannas RI Ajak Gelorakan Kembali Rasa, Semangat, dan Wawasan Kebangsaan

“Kita harus belajar dari para pendiri bangsa yang dengan berbagai keterbatasannya, namun mampu mendedikasikan pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.” ucap Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. pada upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kemerdekaan RI di Halaman Tengah, Lemhannas RI pada Senin (17/8).....(selengkapnya hal. 12)

Daftar Isi:

Counselor Kedubes Sudan Jajaki Kerja Sama dengan Lemhannas RI...hal 2

Pembekalan tentang Poros Maritim Dunia...hal 3

Ketua Lipi Bahas Pemanfaatan Iptek di Lemhannas RI...hal 3

Presidential Lecture Presiden Republik Turki di Lemhannas RI...hal 4

Dukung *Good Governance*, Lemhannas RI Gelar Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi...hal 5

Asabri Sosialisasikan Manfaat Asuransi di Lemhannas RI...hal 6

Harmonisasi Hubungan Pusat-Daerah...hal 7

Buka P3DA, Gubernur Lemhannas RI Tekankan Pentingnya Pemimpin Daerah Berkarakter Kebangsaan...hal 7

Delegasi Perancis Hadiri Konferensi Internasional tentang *Cyber Security* ...hal 8

Waspada Korupsi, Lemhannas RI Gelar RTD tentang Optimalisasi Sistem Pemberantasan Korupsi...hal 9

Gubernur Lemhannas RI: Jaga Stabilitas Sosial dan Politik...hal 9

Lemhannas RI Kaji Revitalisasi Pengelolaan Peternakan Sapi...hal 10

Ketua Komnas HAM Paparkan Kemajuan HAM di Indonesia...hal 11

Pelopop *Transformative Scenario Planning* Berbagi Ilmu di Lemhannas RI...hal 11

Melalui Refleksi Sidang BPUPKI-PPKI, Lemhannas RI Ajak Gelorakan Kembali Rasa, Semangat dan Wawasan Kebangsaan...hal 12

Tim Redaksi:

Pengarah:

Suhardi Alius

Penanggung Jawab:

E. Estu Prabowo

Redaktur Pelaksana:

Wahyu Widji Pamungkas

Penyunting/Editor:

Bambang Iman Aryanto

Staf Redaksi:

Trias Noverdi, Aditya Solehah, Erlin Dyah Pratiwi, Ni Made Vira Saraswati, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitriana

Desain:

Bambang Iman Aryanto

Fotografer:

Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto

Sekretariat:

Linda Purnamasari, Gatot, Indah Winarni

Distribusi:

Sumurung, Supriyono

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

Counselor Kedubes Sudan Jajaki Kerja Sama dengan Lemhannas RI



“**D**i Lemhannas ini ada tiga deputy, yang pertama Deputy Pendidikan, yang kedua Deputy Pengkajian, dan yang ketiga Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan,” demikian ujar Direktur Operasi Pendidikan Lemhannas RI Brigjen TNI Juwondo saat mewakili Gubernur Lemhannas RI menerima *Courtesy Call* Counselor Kedubes Sudan Mr. Eltayeb Abdelgadir Balool beserta jajaran di Ruang Nusantara I Gd. Tri Gatra Lt. 1 Lemhannas RI pada Rabu (29/7).

Dalam kesempatan ini, Juwondo menyampaikan bahwa Lemhannas RI menyelenggarakan pendidikan singkat dan reguler yakni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) yang bertujuan untuk menyiapkan kader pimpinan tingkat nasional bagi para pejabat militer dan sipil. Selain itu, ada juga peserta yang berasal dari sebelas negara sahabat yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Timor Leste, Sri Lanka, Aljazair, Zimbabwe, Australia, Papua Nugini, dan Myanmar. Hingga saat ini, sudah 27 negara yang menjadi peserta program pendidikan di Lemhannas RI.

Eltayeb Abdegadir Balool yang merupakan lulusan Akademi Tinggi Kajian Keamanan dan Strategi Sudan ini berharap akan ada Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) dan kerjasama lebih lanjut mengenai pertukaran peserta pendidikan antara Lemhannas RI dengan lembaga sejenis di Sudan. “Semoga ke depannya (lembaga ini) dapat bekerja sama dengan lembaga di Indonesia (Lemhannas RI),” pungkas Eltayeb Abdegadir Balool.

Turut hadir dalam acara ini yakni Kepala Biro Kerja Sama Brigjen TNI Ivan Ronald Pelealu dan Kepala Biro Humas Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc.



Pembekalan tentang Poros Maritim Dunia

Posisi Indonesia yang strategis serta sumber daya alam yang melimpah menunjukkan tingginya potensi maritim Indonesia yang berupa potensi transportasi laut, sumber daya ikan, bioteknologi laut, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral, serta sumber daya hayati laut. Demikian disampaikan Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro saat menjadi narasumber dalam acara *Focus Group Discussion* Pra Seminar Nasional PPSA XX di Gd. Dwi Warna Purwa Lemhannas RI pada Rabu (29/7).

Dalam paparannya yang berjudul **“Tantangan Kebijakan Fiskal dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**, Bambang Brodjonegoro menjelaskan beberapa poin penting, diantaranya yaitu arah kebijakan fiskal dan dukungan fiskal pada sektor kemaritiman.

Seiring dengan kemajuan zaman, tantangan pembangunan di masa depan akan dipengaruhi oleh faktor ekonomi global dan domestik yang harus diwaspadai. Faktor ekonomi global antara lain berupa ketidakpastian perekonomian global, normalisasi kebijakan moneter di negara maju, serta implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berdampak pada ketatnya kompetisi global. Sementara itu, untuk faktor domestik, berupa produktivitas rendah, kapasitas produksi terbatas, keterbatasan infrastruktur, dinamika ketenagakerjaan, kurangnya pengembangan teknologi dan inovasi, dan kesenjangan pendapatan antar kelompok maupun daerah.



Foto : Humas Lemhannas RI

Dalam pengelolaan fiskal, ada enam hal yang menjadi tantangan yakni *fiscal space* yang terbatas, *primary balance* yang negatif, *mandatory spending*, penyerapan kurang optimal dan pola menumpuk, porsi subsidi yang masih besar, dan masih rentannya terhadap faktor eksternal. Adapun strategi dukungan fiskal dalam sektor kemaritiman dan kelautan meliputi tiga hal yakni sisi pendapatan, sisi belanja, dan sisi pembiayaan.

Acara yang dimoderatori oleh Brigjen TNI A. Hafil F. ini turut dihadiri oleh Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose selaku Ketua Senat dan Laksda TNI Aan Kurnia, S.Sos selaku Ketua Seminar. Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para Peserta PPSA XX.

Ketua LIPI Bahas Pemanfaatan Iptek di Lemhannas RI

Pertahanan nasional berbasis kemandirian bangsa harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan industri pertahanan. Demikian dikatakan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Ir. Iskandar Zulkarnaen dalam acara diskusi panel bersama para Peserta PPSA LIII di Ruang NKRI Gd. Panca Gatra Lt. 3 Lemhannas RI pada Kamis (30/7).

Dalam paparannya yang berjudul **“Pemanfaatan Iptek Guna Mendukung Sistem Keamanan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional”** Iskandar Zulkarnaen mengatakan bahwa strategi pengembangan Iptek dalam bidang strategis meliputi aspek Pertanian dan Ketahanan Pangan, Teknologi Kesehatan dan Obat, Teknologi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknologi Transportasi, Teknologi Pertahanan dan Keamanan.

Perkembangan Iptek di kawasan Asean, khususnya dalam bidang proporsi teknologi menengah dan teknologi tinggi di industri manufaktur, Indonesia menempati urutan kelima



Foto : Humas Lemhannas RI

setelah Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya tren Iptek pertahanan di negara maju yang cenderung menurun.

Usai paparan, untuk lebih mendalami pembahasan acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Presidential Lecture Presiden Republik Turki di Lemhannas RI

Presiden Republik Turki H.E. Mr. Recep Tayyip Erdoğan memberikan ceramah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) pada Jumat (31/7) di Auditorium Gajdah Mada, Lemhannas RI. *Presidential Lecture* ini dilakukan pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Turki selama 3 hari di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 53, Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 20 Lemhannas RI, dan para pejabat struktural Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan negara sahabat (Turki) ini bertepatan dalam rangka ulang tahun emas Lemhannas RI dan pertama kali dalam tiga dekade terakhir.

Dalam ceramahnya, Recep Tayyip Erdogan menyampaikan bahwa Turki telah menampung 300.000 penduduk Irak dan 1,7 juta penduduk Syiria yang terlantar dan mengembalikannya ke negara asal. Tindakan ini disebut Erdogan sebagai 'a humanitarian task' yang sesuai dengan hati nurani dan ajaran Islam.

Erdogan juga menyuarakan tentang pentingnya persamaan hak negara-negara di dunia dalam kancah percaturan Internasional. *"And all united nations member countries across the world need to have fair representation at that level, at that stage. So a rotating system, a fair sytem is what we proposed. Each member needs to have a voting rights, they need to be granted their well deserved fair right to vote,"* ujar Erdogan.

Terkait isu terorisme, Erdogan yang secara tegas menolak terorisme mengatakan, bahwa adanya 'dark power' dan 'black propaganda' dibalik isu terorisme. *"But there are some dark powers which are operating here. And unfortunately these dark powers or circles try to convey the image, the black propaganda, that Turkey is actually assisting this kind of a terrorist organization, never has Turkey been involved in this kind of a scenario until today, and never will it be part,"* ungkap Erdogan.

Di samping itu, Erdogan juga menyoroti isu Islamophobia di Eropa, terlebih lagi dengan maraknya diskriminasi terhadap kaum muslim di Eropa akhir-akhir ini. *"To solve this problem we have to remain steadfast in our approach and stand together,"* pungkas Erdogan.

Budi Susilo Soepandji berharap acara ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman akan arti penting dan strategisnya hubungan kerja sama dan persahabatan antara Republik Turki dan Republik Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang.



Foto . Humas Lemhannas RI

Turut hadir dalam acara ini yakni Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan M.P.A., M.B.A., Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ir. Ardi Partadinata, M.H., M.Si., Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., para deputi, Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar, Tenaga Profesional, Duta Besar Republik Turki untuk Indonesia Zekeriya Akcam, perwakilan lembaga/kementerian, serta perwakilan duta besar negara sahabat.



Dukung *Good Governance*, Lemhannas RI Gelar Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi



Foto: Humas Lemhannas RI

“**R**eformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bukan saja menjadi efektif dan efisien, tetapi juga menjadi tulang punggung budaya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol. Drs. Didid Widjanardi, S.H. yang mewakili Gubernur Lemhannas RI dalam acara *Review Reformasi Birokrasi* oleh Tim Evaluator Reformasi Birokrasi di Ruang Gatotkaca Gd. Asta Gatra Lt. 4 Lemhannas RI, Jumat (31/7).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menugaskan Tim Evaluator guna mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Lemhannas RI.

Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing unit kerja di Lemhannas RI tersebut, Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Daerah Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Naptalina Sipayung, S.H. yang bertindak sebagai Supervisor Tim Evaluator RB mengatakan bahwa

instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi harus dirasakan dan diakui oleh publik ataupun masyarakat dan dapat dibuktikan melalui survei internal dan eksternal.

Di samping itu, kata Naptalina Sipayung, langkah-langkah dalam reformasi birokrasi memerlukan komitmen pemimpin yang kuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi. Langkah awal yang harus dilakukan yakni menetapkan *Road Map* yang mencakup 8 area perubahan dan menerapkan manajemen berbasis kinerja. Selanjutnya, upaya dan hasil secara berkala, termasuk *quick wins* juga harus diinformasikan. Monitoring dan evaluasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) harus dilakukan sebagai tindak lanjut hasil review tersebut. “Nilai akhir bukanlah suatu ukuran, tetapi pelaksanaan dan implementasi reformasi birokrasilah yang menjadi penilaian,” pungkas Naptalina Sipayung.

Dalam Sambutan Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan oleh Didid Widjanardi menginstruksikan kepada seluruh unit kerja untuk memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim evaluator; mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan evaluasi dalam mengumpulkan dan menyampaikan data kepada tim evaluator; serta mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi agar tercapai perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lemhannas RI kedepannya.



Asabri Sosialisasikan Manfaat Asuransi di Lemhannas RI



Foto: Humas Lemhannas RI

Direktur Operasional PT Asabri Adhiyatmika, S.E. mengatakan bahwa Asabri memiliki visi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri beserta keluarganya melalui penyelenggaraan Program Asuransi dan Pembayaran Pensiun. Demikian disampaikan dalam acara Sosialisasi Asabri di Ruang Auditorium Gajah Mada, Gd. Panca Gatra Lt. 3 Lemhannas RI, Senin (3/8).

Sesuai Keppres No.8 Tahun 1977 yang merupakan perubahan atas Keppres No. 56 Tahun 1974, dikatakan bahwa setiap Pegawai Negeri, Pejabat Negara, TNI, dan Anggota Polri dipungut iuran sebesar 10% dari penghasilan setiap bulannya yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri/suami, dan tunjangan anak dengan rincian 3,25% iuran tabungan hari tua, 4,75% iuran dana pensiun, dan 2% iuran dana kesehatan (BPJS).

Adhiyatmika juga menyampaikan bahwa Asabri memiliki 9 program yakni Manfaat Santunan Asuransi (SA), Manfaat Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA), Manfaat Santunan Risiko Kematian (SRK), Manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK), Manfaat Santunan Biaya Pemakaman (SBP), Manfaat Santunan Biaya Pemakaman Istri/ Suami (SBPI/ S), Manfaat

Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA), Manfaat Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD), dan Manfaat Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCBKD).

Sementara itu, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. saat membacakan sambutan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. mengatakan bahwa Asabri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan jaminan kesehatan di lingkungan Kemhan RI. "Saya berharap seluruh anggota Lemhannas RI dapat memanfaatkan forum ini," ujar Didit Herdiawan.

Sebelumnya, Didit Herdiawan terlebih dahulu memberikan arahan agar seluruh unit kerja dapat meningkatkan kinerja, mengingat penyerapan anggaran hingga awal Agustus ini masih berkisar di 14-20%.

Hadir dalam acara ini yakni Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ir. Ardi Partadinata, M.H., M.Si., Inspektur Brigjen Pol. Drs. Didid Widjanardi, S.H., Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI M. Nasir Majid, Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI. Ir. Yuhastihar, serta para pejabat struktural Lemhannas RI.



Harmonisasi Hubungan Pusat-Daerah

“Empat bulan terakhir saya mengembalikan 139 Perda, belum lagi Perda-Perda yang tidak dilaporkan,” ungkap Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo dalam ceramah bertema “Membangun Hubungan yang Harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah Guna Memperkuat NKRI” kepada para Peserta PPSA XX di Ruang Bhineka Tunggal Ika Gd. Pancagatra Lt.3 Lemhannas RI, Selasa (4/8).

Menurut Tjahjo Kumolo, disharmonisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan permasalahan yang kerap dihadapi dalam hubungan Pusat dan Daerah. Hal ini terjadi salah satunya karena perbedaan periodisasi jabatan politik eksekutif Pusat dan Daerah, sehingga penyusunan RPJMN dan RPJMD daerah disusun dalam dimensi waktu yang berbeda.

Hubungan Presiden dengan Gubernur dan Bupati/Walikota serta hubungan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis. Oleh sebab itu, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diatur secara jelas dengan berbagai



Foto : Humas Lemhannas RI

instrumen seperti evaluasi, klarifikasi, persetujuan, dan bentuk lainnya.

Tjahjo Kumolo menyatakan salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat dan mempertegas peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota di wilayahnya dengan memberinya perangkat dan dibiayai APBN.

Buka P3DA, Gubernur Lemhannas RI Tekankan Pentingnya Pemimpin Daerah Berkarakter Kebangsaan

Program Pemantapan Pemimpin Daerah Angkatan (P3DA) kembali diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dalam sambutan acara Pembukaan P3DA IX di Ruang Konstitusi Gd. Trigatra Lt.3 Lemhannas RI, Selasa (4/8) menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya Lemhannas RI dalam rangka menyatukan dan menyamakan persepsi terkait pembangunan Indonesia yang sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa.

“Para peserta harus mampu memanfaatkan P3DA sebagai sarana melatih diri dalam rangka meningkatkan kualitas mental dan karakter sebagai pimpinan daerah yang memiliki karakter kebangsaan yang utuh,” ujar Budi Susilo Soepandji.

Pada acara pembukaan tersebut, turut hadir Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ir. Ardi Partadinata, M.H., M.Si., para Deputi, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian PAN RB, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

P3DA IX kali ini diikuti oleh 45 pemimpin daerah yang



Foto : Humas Lemhannas RI

terdiri dari para Walikota, Wakil Walikota, Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD.

Program pemantapan ini berlangsung selama 2,5 bulan dengan berbagai kegiatan antara lain ceramah, diskusi panel, diskusi kelompok dan antarkelompok, Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), dan diakhiri dengan pembuatan Tugas Karya Akhir (TKA).



Delegasi Perancis Hadiri Konferensi Internasional tentang *Cyber Security*

“**B**ig appreciation for French Embassy for the strategic collaboration between Lemhannas RI and French Embassy,” ujar Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. saat membuka acara Konferensi Internasional tentang Cyber Security di Ruang Nusantara Gd. Tri Gatra Lt. 1 Lemhannas RI, Selasa (4/8).

Acara yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang SKA Prof. Dr. Dadan Umar Daihani, D.E.A. ini menghadirkan enam pembicara yakni Monsieur Stephan Baumgard, Sekretaris Kabinet RI Andi Wijayanto, Konsultan Senior Strategi Pengembangan Bisnis Internasional Candice Tran Dai, Staf Khusus ICT Kementerian Pertahanan RI Sylvia W. Sumarlin, Kepala Departemen Forensik Komputer AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar, M.Sc., C.H.FI., C.E.I., E.C.I.H., dan Kasubdit Regional Ditjan Internasional Lemhannas RI Kolonel Sus Dr. Ir. Rudy Gultom, M.Sc.

“*Cyber security is related to cyber terrorist,*” ujar Stephane Baumgard. Menurutnya, *cyber security* memerlukan perhatian besar karena terkait dengan isu-isu besar seperti terorisme.

Memasuki era *e-commerce* ini, Andi Wijayanto mengatakan

bahwa *cyber security* merupakan sebuah keharusan. Setidaknya ada 7 tantangan yang harus diperhatikan yakni mengenai visi, penegakan hukum, sinergitas pemerintah dan organisasi, koordinator, infrastruktur, penyampaian informasi, dan kewaspadaan.

Candice Tran Dai berpendapat bahwa saat ini sedang berkembang tren global mengenai *cyber space* dan *cyber attack* dalam media global. Hal ini senada dengan pendapat Sylvia W. Sumarlin mengatakan bahwa saat ini internet didominasi interaksi antarmanusia. Oleh karenanya, terciptanya *cyber security* menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Sementara itu, Muhammad Nuh Al-Azhar mengatakan bahwa *cyber security* merupakan salah satu *critical infrastructure attack* yang terdiri dari *cyber war*, *cyber terrorism*, dan *cyber crime* sebagaimana yang diungkapkan oleh Rudy Gultom terkait bahaya *cyber attack*.

Delegasi Perancis ini sebelumnya diterima dalam sebuah *Courtesy Call* oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. di Ruang Tamu Pimpinan Gd. Tri Gatra Lemhannas RI pada kesempatan yang sama.



Gubernur Lemhannas RI: Jaga Stabilitas Sosial dan Politik

“Saya berharap agar kesempatan yang singkat ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya sebagai wadah tukar pikiran,” ujar Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. saat acara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Pejabat Pemerintah Daerah Angkatan XXXVIII, Kamis (6/8) di Ruang Syailendra Gd. Tri Gatra Lt. 3 Lemhannas RI.

Budi Susilo Soepandji mengatakan bahwa para peserta dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah dan negara harus mewaspadaai timbulnya eksekutif-eksekutif negara yang akan mengganggu stabilitas nasional. “Saudara-Saudara harus bisa menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah masing-masing,” pungkaskan Budi Susilo Soepandji.

Kegiatan pemantapan yang berlangsung 6-12 Agustus ini diikuti oleh 90 peserta yang terdiri dari Kabupaten/kota Ambon, Batam, Aceh, Bekasi, Bogor, Sabang, dan Samarinda serta diisi dengan berbagai acara seperti diskusi, ceramah, pembinaan peserta, dan *outbond*.

Turut hadir dalam acara ini yakni Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksdya TNI Ir. Yuhastihar, Tenaga Pengajar, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.



Foto : Humas Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

Waspada Korupsi, Lemhannas RI Gelar RTD Optimalisasi Sistem Pemberantasan Korupsi

“Kejahatan korupsi dinilai semakin masif dan terstruktur, oleh karenanya perlu adanya elaborasi,” ujar Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. saat membuka acara Round Table Discussion bertema “**Optimalisasi Sistem Pemberantasan korupsi guna Menciptakan Stabilitas Politik dalam Rangka Ketahanan Nasional**” di Ruang Kresna Gd. Tri Gatra Lt. 4 Lemhannas RI pada Rabu (5/8).

Deputi Pengkajian Strategis Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. mengatakan bahwa kajian ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para narasumber. Nantinya, hasil kajian ini akan disampaikan kepada Presiden RI.

Acara yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Dr. Rosita Noor, M.A. ini menghadirkan empat orang narasumber yakni Wakil Jaksa Agung RI Dr. D. Andhi Nuranto, S.H., M.M., Staf Khusus Bidang Hukum Mensesneg Lambock Nahattands, Direktur Tindak Pidana Korupsi Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus, S.I.K., S.H., M.Si., M.M., dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, S.H.S.P.N., L.L.M.

Untuk menyempurnakan kajian ini, para narasumber menyampaikan berbagai pendapat mengenai sistem pemberantasan korupsi, antara lain Andhi Nuranto yang mengatakan bahwa rivalitas antarinstansi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus dihilangkan. Sedangkan Lambok Nahattands berpendapat bahwa pendidikan budi pekerti sangat diperlukan untuk mencegah tindak korupsi. Dalam kesempatan itu pula, Ahmad Wiyagus mengatakan bahwa upaya optimalisasi bukan hanya sekadar menduplikasi sistem, tetapi menyesuaikan kondisi Indonesia saat ini, sementara itu Adnan Pandu Praja mengungkapkan pentingnya *political will* dalam pemberantasan tindak korupsi.

Hadir dalam acara ini para Penanggap Utama yakni Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI. Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Tenaga Profesional bidang Hukum dan HAM Irjen Pol (Purn) M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.H. beserta Tenaga Penkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Lemhannas RI Kaji Revitalisasi Pengelolaan Peternakan Sapi

Ada tiga masalah bangsa yang perlu diwaspadai yakni merosotnya wibawa negara, pelemahan ekonomi, dan krisis kepribadian bangsa. Demikian dikatakan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. saat membuka acara *Round Table Discussion* bertema **“Revitalisasi Pengelolaan Peternakan Sapi Nasional Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan dalam Rangka Ketahanan Nasional”** di Ruang Kresna, Gd. Tri Gatra Lt. 3 Lemhannas RI, Kamis (6/8).

Merupakan sebuah ironi ketika negara agraris yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia justru harus mengimpor sapi. Dengan segala potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki, Indonesia berpotensi untuk swasembada sapi. “Indonesia dapat melakukan swasembada sapi nasional jika dapat direncanakan, dikelola, dan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi,” ujar Budi Susilo Soepandji.

Acara yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang SKA ini dihadiri oleh beberapa narasumber yakni Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Ir. Syukur Iwanto, M.S., M.B.A., Perwakilan Kemenko Perekonomian M. Mawardi, dan Direktur Ekspor Produk dan Pertambangan

Kementerian Perdagangan RI Drs. Didi Sumedi, M.B.A.

Para narasumber memberikan berbagai masukan yang akan memperkaya hasil kajian di antaranya yakni Syukur Iwanto mengatakan bahwa pengembangan peternakan sapi memerlukan berbagai kebijakan seperti penguatan aspek perbenihan dan perbibitan hingga perbaikan tata laksana dan pengawasan impor.

M. Mawardi mengusulkan untuk memberdayakan pulau-pulau yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai lahan untuk ternak sapi.

Sementara Didi Sumedi mengatakan bahwa membangun kemitraan antar pelaku usaha daging sapi serta koordinasi daerah sentra ternak merupakan hal yang perlu dilakukan guna menjamin ketersediaan sapi dan daging sapi, sementara Frans Lebu Raya mengatakan bahwa pemerintah NTT terus mendorong warganya untuk mencapai program satu juta sapi di 2018.

Turut hadir dalam acara ini yakni Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, dan para Pejabat Struktural Lemhannas RI.



Foto : Humas Lemhannas RI



Foto: Komnasham.go.id

Ketua Komnas HAM Paparkan Kemajuan HAM di Indonesia

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, ada gelombang baru akan arti penting keberadaan HAM dan tuntutan tanggung jawab moral serta hukum bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan. Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM Nur Kholis, S.H., M.A. dalam ceramahnya kepada para peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XX (PPSA XX) di Ruang Bhinneka Tunggal Ika Gd. Panca Gatra Lt.3, Lemhannas RI, Jumat (7/8).

Kemajuan pengakuan HAM di dunia untuk pertama kalinya secara konkret diwujudkan secara moral-praktis ketika

PBB meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Paris tahun 1948. Di Indonesia sendiri, pengakuan HAM secara moral-praktis terjadi pasca Era Reformasi bergulir, meskipun UUD 1945 telah menjamin hak-hak warga negaranya.

Menurut Nur Kholis, Indonesia baru melakukan adopsi atas kovenan HAM Internasional yang diratifikasi dengan pengesahan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang disusul dengan berbagai pengesahan UU terkait HAM lainnya seperti pengesahan kovenan internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial, hak anak, hak eksoab, hak sipol, pengadilan HAM dan UU terkait HAM lainnya.

Lembaga penyelenggara kekuasaan negara mempunyai fungsi dan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan HAM. Eksekutif mempunyai tugas memastikan implementasi HAM oleh aparat pemerintah. Sebagai lembaga yang berkuasa membuat hukum, legislatif harus menyusun dan memastikan produk legislasi yang berorientasi pada HAM sekaligus mengawasi pemerintahan dalam pelaksanaan implementasi hukum HAM. Sementara itu, yudikatif harus mampu menghasilkan produk hukum yang berorientasi pada HAM. Selanjutnya ceramah ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari peserta.

Pelopor *Transformative Scenario Planning* Berbagi Ilmu

“Konsep untuk bercerita tentang apa yang mungkin dapat terjadi sebagai cara untuk menyiapkan dan memiliki ketahanan di masa depan, bukan untuk memprediksi dan mengontrol, adalah dimulainya penggunaan metode skenario modern empat puluh tahun lalu”, ungkap pelopor dan penulis buku *Transformative Scenario Planning* Adam Kahane, yang juga merupakan Direktur Konsultan Global dari Kanada, Reos Partners, dalam acara Kuliah Umum di Lemhannas RI, Ruang Gatot Kaca, Gd. Astra Gatra Lt. 3, Jumat (7/8).

Dalam ceramah yang bertajuk “**Metodologi Skenario dan Implementasi di Berbagai Negara**”, Kahane menjelaskan skenario adalah alat untuk berpikir tentang masa depan untuk membantu sebuah lembaga/perusahaan beradaptasi di masa depan, bukan untuk memprediksi atau mengontrolnya, melainkan untuk lebih memiliki ketahanan, lebih kompetitif, dan lebih mampu bertahan.

Melalui berbagai kegagalan dan keberhasilan serta pembelajarannya selama dua puluh tahun dalam menggunakan metodologi *transformative scenario planning* di berbagai belahan dunia dan pada berbagai isu ini, Kahane menyatakan metodologi ini secara umum mengajak untuk bergerak dan maju bersama dalam situasi penting yang sulit. “Saya tidak mengatakan untuk memecahkan masalah, tetapi



Foto: magazineim.com

saya mengatakan untuk bergerak bersama, tidak bergerak maju sendiri-sendiri atau *top-down*, melainkan untuk bergerak maju dan bekerja bersama-sama dengan semua *stakeholder*”, tegas Adam Kahane.

Kuliah umum yang diselenggarakan dalam rangka mendukung penyusunan Skenario Indonesia 2045 Lemhannas RI ini dimoderatori oleh Taprof Bidang Ekonomi Dr. Panutan S, S.E., M.T., Ak dan diikuti oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo, D.E.A., Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksmana Madya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A., pejabat eselon I dan II, para pakar, taji, dan taprof Lemhannas RI.



Melalui Refleksi Sidang BPUPKI-PPKI, Lemhannas RI Ajak Gelorakan Kembali Rasa, Semangat dan Wawasan Kebangsaan

“Kita harus belajar dari para pendiri bangsa yang dengan berbagai keterbatasannya, namun mampu mendedikasikan pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.” ucap Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. pada upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kemerdekaan RI di Halaman Tengah, Lemhannas RI pada Senin (17/8).

Dalam amanatnya, Budi Susilo Soepandji selaku inspektur upacara mengatakan bahwa momentum tujuh puluh tahun kemerdekaan RI yang bertepatan dengan lima puluh tahun Lemhannas RI ini memiliki arti penting tersendiri. Kedua momentum diharapkan dapat menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran Lemhannas RI untuk meningkatkan kinerja kolektif sebagai perwujudan nyata implementasi gerakan nasional “Ayo Kerja” yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Dalam persaingan dan dinamika geopolitik global, Budi Susilo Soepandji menilai bahwa kerja keras saja tidaklah cukup. Dibutuhkan pemahaman wawasan dan rasa kebangsaan yang kuat sebagai prasyarat utama dan pertama agar bangsa Indonesia mampu bangkit dan keluar dari perangkap globalisasi dan demokrasi liberal yang individualistis. Oleh karena itu, peringatan 70 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk menyegarkan dan memperkuat rasa, semangat dan wawasan kebangsaan seluruh komponen bangsa,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini pula, Budi Susilo Soepandji juga

mengajak untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan kesatuan, gotong-royong dan rela berkorban dari para tokoh pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI-PPKI. “Penting untuk direnungkan mengingat, justru dalam sidang – sidang BPUPKI dan PPKI itulah, perbedaan pandangan dan kepentingan berbagai etnis, agama dan kelompok mengalami kristalisasi untuk berkorban dan bersepakat mewujudkan kepentingan yang lebih besar,” kata Budi Susilo Soepandji.

Dengan kapasitas dan konsistensi yang telah ditunjukkan selama ini, Budi Susilo Soepandji meyakini bahwa Lemhannas bersama komponen bangsa terkait lainnya akan mampu menggelorakan kembali rasa, semangat dan wawasan kebangsaan yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Di akhir amanat, “Kita harus meningkatkan budaya kerja keras dan semangat gotong royong dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi kita masing - masing. Sekecil apapun sumbangsih peran yang kita lakukan baik tenaga dan atau pikiran dalam menggelorakan kembali semangat kebangsaan dan semangat proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 akan memiliki dampak positif bagi bangsa dan negara.” pungkas Budi Susilo Soepandji.

Hadir dalam upacara ini yakni Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ir. Ardi Partadinata, M.H., M.Si., Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., para Deputi, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, Peserta PPRa LIII, Peserta PPSA XX, Peserta P3DA IX, dan para pejabat Struktural Lemhannas RI.